

## EVALUASI PROGRAM STUNTING PADA PERATURAN BUPATI NO 6 TAHUN 2019 TENTANG PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BANGKALAN

Laila Muflihah<sup>1</sup>, Dida Rahmadanik<sup>2</sup>, M. Kendry Widiyanto<sup>3</sup>  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni 2024

Revised Juni 2024

Accepted Juni 2024

Available online Juni 2024

[muflihahlaila@gmail.com](mailto:muflihahlaila@gmail.com)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstract

*Accelerating the reduction in stunting rates became the focus of the central government which became the attention of President Joko Widodo who then issued Presidential Regulation 72/2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting. East Java is one of the provinces with the largest percentage of stunting, reaching 30%. This is what makes the East Java Provincial Government encourage every region, especially the 10 main regions with the highest stunting rates, to encourage accelerated reduction in stunting rates. Bangkalan Regency, through Regent Regulation 6/2019, is trying to reduce stunting rates through the 1000 HPK program. However, this still has obstacles in its implementation. Therefore, this research aims to examine the evaluation of the implementation of reducing stunting rates in Bangkalan Regency in terms of Regent Regulation 6/2019. This research is descriptive qualitative research with data collection in the form of policy theory, interviews, documentation, and observation with analysis to get answers to research issues. The*

*theory that is the benchmark in this research is the theory put forward by William n Dunn regarding Evaluation. The results of the research show that several things that are being evaluated for the stunting reduction program in Bangkalan Regency are that there needs to be a revision of the Regent Regulation 6/2019 which is adjusted to the latest regulations, so that this program can be implemented comprehensively and on target. This can increase the efficiency and effectiveness of program implementation*

**Keyword:** *Decreased stunting rate, Regent's Regulation Number 6/2019 concerning Reducing Stunting Rates in Bangkalan Regency, 1000 HPK*

### Abstrak

Percepatan penurunan angka stunting menjadi fokus pemerintah pusat yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yang kemudian menerbitkan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jawa Timur menjadi salah satu Provinsi dengan persentase stunting terbesar mencapai angka 30%. Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong setiap daerah, khususnya 10 daerah utama dengan angka stunting tertinggi untuk mendorong percepatan penurunan angka stunting. Kabupaten Bangkalan melalui Perbup 6/2019 berupaya mewujudkan penurunan angka stunting melalui program 1000 HPK. Namun, hal ini masih memiliki hambatan dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evaluasi penyelenggaraan penurunan angka stunting di Kabupaten Bangkalan ditinjau dari Perbup 6/2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data berupa teori kebijakan, wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan analisis untuk mendapatkan jawaban atas isu penelitian. Teori yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh William n Dunn mengenai Evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap beberapa hal yang menjadi evaluasi dari program penurunan angka

stunting di Kabupaten Bangkalan adalah perlu adanya revisi dari Perbup 6/2019 yang disesuaikan dengan aturan terbaru, agar program ini dapat dilaksanakan secara komperhensif dan tepat sasaran. Hal ini dapat menambah efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program.

**Kata Kunci:** Penurunan angka Stunting, Peraturan Bupati Nomor 6/2019 tentang Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Bangkalan, 1000 HPK

## 1. PENDAHULUAN

Tingkat prevalensi yang tinggi, menempatkan Indonesia sebagai negara kedua dengan angka stunting yang tinggi, dengan persentase mencapai 31,8% setelah timor leste dengan persebtase jumlah anak stunting 48,8%. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah untuk mengurangi angka stunting. Jika perhitungkan, persentase stunting sebanyak 31,8% adalah terdapat lebih dari 8,9 juta anak di bawah 12 bulan mengalami stunting. Ciri khusus dari anak yang mengalami stunting adalah dari tinggi badan anak. Tinggi badan anak stunting, diperkirakan kurang dari tinggi rata-rata anak normal.

Stunting adalah permasalahan yang wajib mendapatkan perhatian khusus, karena dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pada anak. Stunting juga disebut dengan kondisi anak gagal tumbuh pada usia pertumbuhan seharusnya. Pencegahan terhadap stunting dapat dilakukan dengan memberikan pengertian atau sosialisasi kepada remaja, pasangan suami istri, dan pemberian gizi eksklusif kepada anak dibawah 2 (dua) tahun.

Jawa timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus stunting yang cukup besar di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menko PMK), menyatakan bahwa pemerintah akan berfokus pada penanganan stunting, khususnya di wilayah Jawa Timur. Jumlah persentase anak stunting di wilayah Jawa Timur cukup tinggi 18,4% anak stunting, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti usia ibu hamil yang masih belum cukup umur, kesehatan anak, atau gizi yang diberikan kepada anak.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pemerintah Provinsi Jawa timur, terdaat 10 Kota/Kabupaten yang menjadi fokus utama Pemerintah untuk percepatan penurunan stunting karena memiliki persentase angka stunting lebih dari 20%, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kota Batu, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Lumajang.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong setiap daerah kota/kabupaten untuk lebih memperhatikan anak stunting. Oleh karena itu diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Bangkalan, menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Selanjutnya disebut Pemkab Bangkalan) untuk dapat meminimalisir angka anak stunting. Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan menjadi salah satu program yang dilakukan oleh Kabupaten Bangkalan.

Upaya pemerintah dalam hal ini mengikutsertakan tim dinas kesehatan, puskesmas, hingga masyarakat di setiap desa atau kecamatan untuk turut aktif dalam program percepatan penurunan angka stunting, dengan membentuk TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) agar menekan angka stunting yang ada di Kabupaten Bangkalan. Namun, dalam pelaksanaannya pprogram penurunan angka stunting ini memiliki hambatan, diantaranya adalah minimnya anggaran biaya yang disediakan dan daya jangkau pembinaan pencegahan stunting yang terbatas.

Oleh karena itu untuk mempercepat penyelenggaraan program percepatan penurunan stunting, Presiden Joko Widodo dengan Menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun

2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai evaluasi program penurunan stunting anak di Kabupaten Bangkalan ditinjau dari Perbup 6/2019 setelah diterbitkannya Perpres 72/2021.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif deskriptif adalah yang menjadi tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif ini bertumpu pada bahan penelitian berupa teori maupun fakta yang ditemukan pada lokasi penelitian secara alami. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian akan dianalisis dan membangun hipotesis, yang kemudian memberikan jawaban atas isu penelitian yang dikaji dalam penelitian ini. Lokasi penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah di Desa Junok, Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan yang terletak di Jalan Raya Ketengan, Burneh. Pencegahan stunting pada anak tingkat daerah menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah. Oleh karena itu dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pencegahan, serta menanggulangi kasus stunting di Kabupaten Bangkalan sebagai implementasi Perbup 6/2019.

Program yang diusung dan diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah program 1000 HPK yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019 sebagai pelaksanaan kebijakan penurunan stunting pada Perbup 6/2019. Program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), meliputi 270 hari pada saat kehamilan, dan 730 Hari kehidupan anak setelah lahir hingga anak berusia 2 tahun. Kader dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan ini secara berkala akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang disusun sebagai langkah pencegahan stunting pada anak.

Sasaran masyarakat dalam program percepatan penurunan stunting, berdasarkan Perbup 6/2019 dan Perpres 72/2021, bahwa yang menjadi sasaran dalam program penurunan stunting nasional adalah calon pengantin, pasangan suami istri dengan usia produktif, dan anak di bawah usia 2 (dua) tahun. Kegiatan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk mensukseskan penurunan stunting di Indonesia adalah Sekolah Ibu pintar, yakni kegiatan berupa sosialisasi yang digagas oleh Tim TPPS.

### **B. Pembahasan**

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan mengevaluasi program penurunan angka stunting di Kabupaten Bangkalan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji secara komprehensif program penurunan angka stunting adalah teori yang dikemukakan oleh William n Dunn, yang menyebutkan bahwa faktor penilaian keberhasilan terhadap program yang sedang atau sudah selesai dilaksanakan dalam rangka evaluasi program, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Adapun pembahasan mengenai keterkaitan antara teori dengan pelaksanaan program penurunan angka stunting di Kabupaten Bangkalan secara rinci, sebagai berikut:

#### **1) Efektifitas**

Upaya yang dilakukan oleh penyelenggara dalam mengoptimalkan program untuk memberikan manfaat kepada sasaran program disebut dengan efektifitas. Tolak ukur dari efektifitas ini adalah kepuasan dari masyarakat, baik dalam hal partisipasi, dan mendukung

program yang terselenggara. Program 1000 HPK yang dilaksanakan dalam menekan angka stunting di Kabupaten bangkalan dilakukan dengan bantuan TPK (Tim Pendamping Keluarga), dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Informan dari Dinas Kesehatan divisi Pencegahan Stunting di Kabupaten Bangkalan, menyebutkan bahwa:

*“Pencegahan stunting di Kabupaten Bangkalan setelah terbitnya Perpres 72/2021 sangat membantu melengkapi kebijakan pada Perbup 6/2019, karena teknis yang tidak diatur dalam perbup, diatur dalam perpres tersebut”*

Maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa terselenggaranya Program 1000 HPK efektif dilakukan di Kabupaten Bangkalan.

## 2) Efisiensi

Upaya atau program yang terselenggara perlu dinilai sumber daya yang membantu proses pelaksanaannya. Hal ini menjadi salah satu penilaian efisiensi sebagai indikator dari evaluasi yang dikemukakan oleh William n Dunn. Hasil wawancara terhadap Ibu Nurul sebagai Informan dalam penelitian ini antusias memberitahukan bahwa masyarakat mulai peduli dengan kesehatan anak khususnya pada indikator kesehatan stunting pada anak.

Selain berfokus pada kesehatan anak pencegahan stunting di Kabupaten Bangkalan, rupanya di setiap daerah juga terdapat Gerakan Masyarakat (Germas) yang merupakan anggota tim puskesmas atau posyandu daerah sekitar unuk memberikan tips dan trik menjaga kebersihan lingkungan, rumah, hingga cara menjaga lingkungan sehat dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan persentase data yang akurat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi STUNTING
1	SOCAH	JADDIH	BILAPORAH	750	17	8,24
2	SOCAH	JADDIH	SANGGRA AGUNG	667	26	10,66
3	SOCAH	SOCAH	DAKIRING	419	32	17,68
4	AROSBAYA	AROSBAYA	GLAGGA	525	28	9,72
5	KLAMPIS	KLAMPIS	TENGGUN DAYA	427	17	10,97
6	KOKOP	KOKOP	DUPOK	710	21	7,27
7	KOKOP	KOKOP	DURJAN	739	66	10,53
8	KOKOP	KOKOP	MANDUNG	892	76	19,29
9	KWANYAR	KWANYAR	PASANGGRAHAN	620	24	12,83
10	TANAH MERAH	TANAH MERAH	JANGKAR	640	28	11,52
11	TANAH MERAH	TANAH MERAH	BUDDAN	431	18	9,89
12	TANAH MERAH	TANAH MERAH	BATANGAN	579	48	17,02
13	MODUNG	KEDUNDUNG	PATEREMAN	423	18	7,59
14	MODUNG	KEDUNDUNG	PATENGTENG	492	24	11,21
15	MODUNG	MODUNG	MANGGAAN	411	18	10,34
16	MODUNG	MODUNG	ALASKOKON	470	29	12,39
17	GALIS	GALIS	LONGKEK	693	16	10,53
18	GALIS	GALIS	LANTEK TIMUR	583	41	15,07
19	GALIS	GALIS	DALEMAN	528	22	11,89
20	GALIS	GALIS	PATERONGAN	701	87	29,90

Gambar 2. 1 Gambar Data Masyarakat Stunting di Kabupaten Bangkalan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan

Kesimpulan dari indikator efisiensi ini adalah antusias masyarakat yang tinggi menunjukkan kepada kesehatan anak khususnya pada indikator kesehatan stunting pada anak sudah membuktikan bahwa pelaksanaan program sudah cukup berjalan dengan efisien.

## 3) Kecukupan

Kecukupan sebagai indikator evaluasi adalah penilaian program terlaksana sesuai dengan target yang ditujukan. Berlakunya Pepres 72/2021 ini menyempurnakan penerapan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangkalan. Hal ini disampaikan oleh Informan dalam penelitian ini melalui wawancara. Penerapan perbup 6/2019 dinilai harus direvisi kembali. Karena dalam perbup tersebut teknis percepatan penurunan percepatan angka stunting ini belum secara detail diatur didalamnya.

Hambatan justru muncul dari peraturan pelaksanaannya, yakni pada Perbup 6/2019 tentang Penurunan Stunting Di Kabupaten Bangkalan. Karena dinilai kurang sesuai dengan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting, oleh karena itu perlu disempurnakan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan di tingkat daerah dengan mempertimbangkan faktor penunjang dan penghambat yang dapat terjadi.

Oleh karena itu, menurut penulis terhadap kecukupan dalam evaluasi program penurunan angka stunting di Kabupaten Bangkalan dengan Merujuk pada kebijakan dalam Perbup 6/2019 perlu adanya pembaharuan untuk lebih detail mengatur mengenai teknis dari program yang dapat dilakukan untuk penurunan stunting.

#### 4) Kesetaraan

Perbandingan program antara yang satu dengan lainnya menjadi tolok ukur keberhasilan suatu program yang sedang atau telah berlangsung. Adapun hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan dalam suatu program atau kegiatan yang dapat dinilai program atau kegiatan tersebut dapat dikatakan sukses untuk dilaksanakan, sebagai contoh indikator tersebut diantaranya adalah waktu, proses, output, dan lain sebagainya.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Informan Farid dari Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa, terhadap pelaksanaan pencegahan stunting di Kabupaten Bangkalan ini memiliki kekurangan di alokasi dana dan penganggaran dana tersebut.

*"ada yang namanya arisan masyarakat mbak, nah ini dihimpun dari masyarakat yang mengikuti program pencegahan stunting ini, dana tersebut dikelola secara transparan oleh tim lapangan untuk optimalisasi pelaksanaan program pencegahan stunting di setiap daerah"*. (hasil wawancara pada tanggal 08 Mei 2024)

Hingga saat ini pemerintah hanya mengandalkan anggaran dana yang masih dinilai kurang yang didistribusikan kepada perangkat desa. Oleh karena itu, terdapat inisiatif yang justru datang dari masyarakat untuk mensukseskan hal ini. Inilah yang menurut penulis memenuhi unsur kesetaraan, bahwa terhadap program yang dinilai dapat menguntungkan masyarakat, maka masyarakat dengan senang hati mendukung dan mensukseskan program penurunan stunting di Kabupaten Bangkalan.

#### 5) Responsivitas

Keterlibatan masyarakat, tokoh, atau publik yang menjadi sasaran dalam suatu kegiatan atau program yang sedang berlangsung menjadi indikator penting suatu kegiatan terlaksana dengan baik. Semakin banyak masyarakat yang dalam hal ini merupakan sasaran kegiatan yang mendapatkan manfaat atas program yang sedang atau telah terselenggara, menjadi bahan pertimbangan program tersebut berhasil diselenggarakan. Hal ini merupakan indikator Responsivitas dalam indikator evaluasi terhadap program atau kegiatan yang sedang atau telah berlangsung. Dalam proses upaya pencegahan stunting di Kabupaten Bangkalan telah dilaksanakan beberapa program sebagaimana sebelumnya telah diuraikan dalam indikator-indikator lainnya. Kegiatan tersebut disambut baik oleh masyarakat atau warga Kabupaten Bangkalan.



Gambar 2. 2 Bukti Keaktifan Masyarakat dalam Mengikuti Sosialisasi Pencegahan KB  
Gambar diatas adalah bukti bahwa respon masyarakat sangat bagus untuk kegiatan penurunan stunting di Kabupaten Bangkalan. Antusiasme terhadap program pencegahan stunting oleh kader daerah disambut baik oleh warga sekitar. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran aktif masyarakat dalam proses sosialisasi “Sekolah Orang Tua Hebat, KB Sejahtera”.

#### 6) Ketepatan

Ketepatan sebagai indikator dalam proses evaluasi adalah apakah terhadap program yang sedang atau telah dilaksanakan tersebut tepat sasaran atau tidak. Tolok ukur dalam indikator ini adalah kemanfaatan bagi masyarakat sebagai sasaran. Menurut penulis program 1000 HPK ini tepat sasaran. Namun mengenai kemanfaatan program belum dapat ditentukan. Belum dapat dipastikan sejauh mana masyarakat dapat mengerti dan memahami urgensi dari penetapan Pepres 72/2021 dan Perbup 6/2019. Oleh karena itu perlu adanya gerakan yang secara nyata dilakukan oleh pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap dampak stunting pada anak.

## 4. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan rumusan masalah mengenai Bagaimana Evaluasi Program Stunting Pada Peraturan Bupati No 6 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting Di Kabupaten Bangkalan. Bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan program stunting di Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan apa yang tertera di Peraturan Bupati No 6 Tahun 2019 yang diterapkan di Kabupaten bangkalan berjalan dengan optimal, hal tersebut dibuktikan bahwa angka stunting di kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan telah mengalami penurunan.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan penurunan stunting dikatakan sudah efektif, meski begitu ada beberapa hal yang menjadi penghambat berjalannya kegiatan dari program tersebut. Diantaranya alokasi dan penganggaran dana yang masih terbatas, sehingga pelaksanaan program tidak berjalan dengan merata. Namun

pada kebijakan perbup ini belum ada nya pembagian kerja yang spesifik antar instansi terkait, oleh karena itu surat pengajuan dana menjadi terhambat.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Adapun saran dan masukan yang ditulis oleh peneliti, sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, diharapkan dapat mendukung program percepatan penurunan stunting dilakukan secara massif dan diperlukan adanya penyaluran dana yang transparan dan berkecukupan. Sehingga program 1000 HPK dapat dilaksanakan dengan optimal.
- b. Bagi Masyarakat Kabupaten Bangkalan, diharapkan dapat berpartisipasi dalam setiap program yang digagas oleh pemerintah, khususnya dalam program penurunan angka stunting. Dukungan dari masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pemerintah dan kebijakan nasional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, D. N. (2019). Peran Orang Tua terhadap anak usia dini (usia 2 tahun) yang mengalami Picky Eater. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 2(1), 39-44.
- Herawati, D. M. D., & Sunjaya, D. K. (2022). Implementation Outcomes of National Convergence Action Policy to Accelerate Stunting Prevention and Reduction at the Local Level in Indonesia: A Qualitative Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(20), 13591.
- Jati, S. P. (2018). Kebijakan Penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dan Penurunan Stunting di Kota Semarang. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 6(1), 1-7.
- Lestari, U., Oktaviani, A. S., & Intarti, W. D. (2020). Implementasi Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting Pada Kinerja Bidang Di Wilayah Cilacap Kota. *Jurnal Bina Cipta Husada*, 16(2), 51-60.
- Naylor, R., Fang, S., & Fanzo, J. (2023). A global view of aquaculture policy. *Food Policy*, 116, 102422.
- Phitra, F. A., Lipoeto, N. I., & Yetti, H. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Lokus Stunting Kabupaten Merangin Tahun 2022. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 12(3).
- Putri, A. R. (2020). Aspek pola asuh, pola makan, dan pendapatan keluarga pada kejadian stunting. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 6(1), 7-12.
- Sari, D. P., & Yusran, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. *Journal of Civic Education*, 5(1), 90-100.
- Zainuddin, A., Pratiwi, A. D., & Saptaputra, S. K. (2023). Pelatihan Pembuatan Martabak Daun Kelor pada Masyarakat Desa Tapulaga Sulawesi Tenggara Tahun 2023. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JAPIMAS)*, 2(2), 54-61